



Pemerintah Kabupaten
Wonosobo

LAPORAN REVIU RANCANGAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025-2045**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Hasil Reviu.....	2
BAB II REVIU RANCANGAN AKHIR RPJPD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2045.....	3
2.1. Kesesuaian dengan Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	3
2.2. Keselarasan Visi dengan Misi dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045	6
2.3. Keselarasan Misi dengan Arah Kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025- 2045	12
2.4. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025- 2045	15
2.5. Keselarasan Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045	20
2.6. Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025- 2045	29
2.7. Kesesuaian Indikator (IUP) Sebagai Alat Ukur Untuk Mendukung Terwujudnya Visi Kabupaten Wonosobo 2045	38
2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	40
2.9. Upaya Super Prioritas (Game Changers)	48
BAB III PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045.....	7
Tabel 2.2. Keselarasan Sasaran Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045	8
Tabel 2.3. Keselarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Jawa Tengah, dan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.	9
Tabel 2.4. Keselarasan Misi RPJPN, Misi RPJPD Jawa Tengah, dan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045	10
Tabel 2.5. Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045	12
Tabel 2.6. Keselarasan Misi dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045	14
Tabel 2.7. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.....	15
Tabel 2.8. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.....	17
Tabel 2.9. Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	20
Tabel 2.10. Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	25
Tabel 2.11. Keselarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	27
Tabel 2.12. Konsistensi Antar Bab II dengan Bab III dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045	29
Tabel 2.13. Konsistensi Antar Bab II dengan Bab III dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045	33
Tabel 2.14. Konsistensi Antar Bab III dengan Bab V dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045.....	35
Tabel 2.15. Strategi Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dalam RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Wonosobo.....	40
Tabel 2.16. Upaya Super Prioritas (Game Changer) dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.....	48
Tabel 2.17. Keselarasan Upaya Prioritas dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ketidaksesuaian Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan Visi RPJPD Jawa Tengah 2025-2045	10
Gambar 2.2. Kesalahan Penggunaan Satuan Dalam Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045	39
Gambar 2.3. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Wonosobo dalam RTRW 2023-2043	44
Gambar 2.4. Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, B. Kondisi Fisiografis Pengembangan Kabupaten Wonosobo	44
Gambar 2.5. Persebaran Kawasan Perdesaan yang sudah ditetapkan Bupati Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Proses penyusunan dokumen RPJPD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat 1 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Pada saat ini, Kabupaten Wonosobo telah sampai pada tahun pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 paling lambat Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024. Proses selanjutnya adalah penyempurnaan dari dokumen Ranperda RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama paling lambat Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024 dilanjutkan dengan evaluasi Ranperda oleh

Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sampai dengan tahapan penetapan Ranperda RPJPD paling lambat Minggu Keempat bulan Agustus Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari reviu adalah untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 telah disusun sesuai dengan tata cara, kaidah dan pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Tujuan reviu adalah untuk memastikan adanya keselarasan antara data, permasalahan pembangunan, isu strategis, tantangan pembangunan, visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, hingga indikator yang digunakan.

1.3. Hasil Reviu

Reviu dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 ini dilakukan dengan melihat beberapa pokok bahasan yaitu:

- a. Kesesuaian dengan pedoman penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
- b. Keselarasan visi dengan misi dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045
- c. Keselarasan misi dengan arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045
- d. Keselarasan arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045
- e. Keselarasan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045
- f. Konsistensi antar bab dalam dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045
- g. Kesesuaian indikator (IUP) sebagai alat ukur untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Wonosobo 2045
- h. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
- i. Upaya Super Prioritas (*Game Changers*)

BAB II
REVIU RANCANGAN AKHIR RPJPD KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025-2045

2.1. Kesesuaian dengan Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1. Sistematika Dokumen

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 secara umum telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 (Inmendagri No 1 Tahun 2024), namun ada beberapa catatan. Terdapat beberapa indikator yang disarankan dalam Inmendagri, namun belum tercantum dalam dokumen yaitu:

- a. Aspek Geografi dan Demografi
 - Klimatologi
 - Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW
 - Indeks Ketahanan Energi
- b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat → Dalam Inmen: Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya
 - IPM → masuk ke aspek kesejahteraan sosial, seharusnya masuk ke aspek kesejahteraan ekonomi.
 - Indeks keluarga sehat
 - Indeks kualitas keluarga
 - Indeks perlindungan anak
 - Indeks Pembangunan Pemuda
 - Indeks Pembangunan Kebudayaan
- c. Aspek Daya Saing Daerah → Bergabung dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - PDRB → masuk ke aspek kesejahteraan masyarakat: ekonomi
 - PDRB Per Kapita → masuk ke aspek kesejahteraan masyarakat: ekonomi
 - Indeks Ekonomi Inklusif
 - Indeks Ekonomi Hijau
 - Indeks Pendidikan
 - Angka Literasi → di bab 2 belum ada sajian data, tapi muncul di IUP
 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - Indeks Literasi Digital

- Angka Ketergantungan → masih masuk di aspek kesejahteraan masyarakat
 - Indeks Demokrasi
 - Indeks Rasa Aman
 - Indeks Kerukunan Umat Beragama
- d. Aspek Pelayanan Umum
- Indeks Inovasi Daerah → ada datanya sehingga dapat ditambahkan, cek Kepmendagri No 400.10.11.6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Tersedia data tahun 2019-2023)
- e. Visi dan Misi Daerah
- Sasaran Visi Indonesia Emas → sebaiknya diselaraskan juga dg sasaran visi nasional
- f. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
- Arah Kebijakan Transformasi Daerah/Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (arah kebijakan transformasi disandingkan dengan nas dan prov)

Hasil Diskusi:

Klimatologi dan persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW akan ditambahkan. Terdapat beberapa indikator yang berada di tingkat provinsi seperti indeks pembangunan kebudayaan, indeks ketahanan energi, dan yang lainnya, sehingga indeks tersebut tidak dicantumkan. Kemudian penyusunan RPJPD Kabupaten Wonosobo mengikuti Surat Edaran (SEG) Nomor 000.7/0002940 Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

2.1.2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang perlu disesuaikan:

- a. Perlu diperbarui: Hal 1-2, nomor d yaitu UU No 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- b. Perlu ditambahkan:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- c. Sudah Tidak Berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sudah tidak berlaku dan dihapus, diganti dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- d. Perlu dikoreksi: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, seharusnya Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

Hasil Diskusi:

- Peraturan menteri tidak dapat dimasukkan ke konsideran karena sifatnya pelaksana dan dinamis.
- Masukan untuk landasan hukum Raperda:
 - Terjadi typo di bagian menimbang, masih 2005-2025
 - Poin ke 8 Raperda dihapus, perlu menyusun ulang penomoran
 - Satuan kerja perangkat daerah diubah menjadi perangkat daerah
 - Ditambahkan satu ayat pada Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 5 mengenai pencabutan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025

2.1.3. Penutup

Pada penutup belum mencakup manajemen risiko pembangunan sebagai upaya pencapaian sasaran jangka panjang.

- a. Peraturan Bupati (PERBUP) Wonosobo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Perbup Wonosobo tentang manajemen risiko pelaksanaan pembangunan

2.2. Keselarasan Visi dengan Misi dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

2.2.1. Kesesuaian Visi dan Sasaran Visi

a. Visi Daerah

Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 yang berbunyi “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” dinilai kurang sesuai dengan arahan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengatur bahwa sekurang-kurangnya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”. Visi Wonosobo belum memuat kata “maju”.

Hasil Diskusi:

Terdapat perubahan visi dengan menghilangkan kata “berdaya saing” dan menambahkan kata “maju” sehingga visi Wonosobo menjadi “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Hal ini dikarenakan kata “maju” dinilai lebih kuat karena kata “berdaya saing” merupakan salah satu substansi dari kata “maju” berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045.

b. Sasaran Visi

Sasaran visi RPJPD Wonosobo dinilai kurang sesuai dengan sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi. Dalam RPJPN dan RPJPD Prov terdapat 5 sasaran visi. Sebaiknya sasaran visi RPJPN mengenai kemiskinan dan ketimpangan serta daya saing SDM dipisah. Kemudian indikator sasaran visi sebaiknya disesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi.

Hasil Diskusi:

Untuk indikator pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka yang maju tetap menggunakan indikator indeks daya saing daerah (IDSD). Terjadi kesalahan pada tabel penyelarasan sasaran visi dan indikator RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Indikator tingkat kemiskinan tidak digunakan karena sudah ada di IUP dan akan mengubah cascading.

c. Misi

Misi yang dirumuskan telah mendukung pencapaian visi Wonosobo 2045.

Hasil Diskusi:

Terdapat perubahan penomoran visi yang sebelumnya misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas” berada di urutan ketiga, diubah menjadi urutan kedua, ditukar dengan misi “Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hal ini dikarenakan tata kelola pemerintahan merupakan pondasi penting untuk mengembangkan Kabupaten Wonosobo menjadi pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka.

2.2.2. Keselarasan Visi dan Misi

Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 secara jelas terhubung dengan misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut. Misi merupakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Misi merupakan cerminan dari segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, sehingga terdapat keterkaitan erat antara visi yang diinginkan dengan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapainya. Keselarasan visi dan misi dapat dilihat melalui tabel dibawah.

Tabel 2.1. Keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Misi	Keterangan
Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan	Misi berhubungan kuat terhadap visi karena perwujudan agrobisnis dan pariwisata menjadi lokomotif pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah.
Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Misi berhubungan kuat terhadap visi karena penyediaan infrastruktur menopang pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mendorong keterwujudan pusat agrobisnis dan pariwisata, meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Misi berhubungan kuat terhadap visi karena tata kelola yang adaptif dan berintegritas akan menentukan implementasi pembangunan
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Misi berhubungan kuat terhadap visi karena SDM merupakan fondasi utama dalam memastikan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Misi berhubungan kuat terhadap visi karena pengelolaan SDA dan lingkungan memastikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan keselamatan lingkungan

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Visi dan misi yang telah disusun dinilai sudah selaras dan misi sudah mendukung terwujudnya Kabupaten Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan, namun belum ada penjelasan yang

lebih detail mengenai misi mana saja yang mendukung masing-masing substansi. Kemudian sasaran visi dan misi dinilai telah selaras, namun juga perlu dijelaskan lebih lanjut pada dokumen RPJPD.

Tabel 2.2. Keselarasan Sasaran Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Visi		
	Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan			
Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan			
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas			
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing			
Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan			

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

2.2.3. Keselarasan Visi dan Misi dengan Visi Nasional

Visi dan misi RPJPD diselaraskan dengan visi dan misi nasional, termasuk dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Selarasnya visi dan misi daerah dengan visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 menunjukkan komitmen untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

a. Keselarasan Visi Wonosobo dengan Visi Nasional dan Visi Provinsi

Berikut ini merupakan tabel keselarasan visi RPJPN, visi RPJPD Jawa Tengah, dan visi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.

Tabel 2.3. Keselarasan Visi RPJPN, Visi RPJPD Jawa Tengah, dan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.

Visi Indonesia	Visi Daerah Jawa Tengah	Visi Daerah Wonosobo
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan
Maju: Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, dan Adil	Maju: Daya saing, Modern, Inovatif, Mandiri, Tangguh, dan Aman	Terkemuka yang berdaya saing: Unggul, Kompetitif, Komparatif, Mandiri, Maju, dan Inovatif
Berdaulat: Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, dan Aman	Sejahtera & Berbudaya: Terdidik, Makmur, Sehat, Aman, Adaptif, Berkaraker, Utuh	Sejahtera: Terdidik, Sehat, dan Makmur
Berkelanjutan: Keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola	Berkelanjutan: Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, Risiko bencana	Berkelanjutan: Keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lestari; Kepentingan antargenerasi; Tangguh bencana; Adaptif
Tema khusus: Negara Nusantara: Kekuatan Geopolitik, Kekuatan Militer, Kekuatan Geoekonomi, dan Kekuatan Peradaban Maritim	Tema khusus: Penumpu pangan dan industri nasional	Tema khusus: Pusat Agrobisnis dan Pariwisata

Sumber: Rencana Akhir RPJPN dan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045, 2024 (diolah)

Visi RPJPN, visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan visi RPJPD Kabupaten Wonosobo dinilai selaras dan saling mendukung. Namun visi RPJPD Wonosobo belum tercantum kata maju yang seharusnya ada dalam visi. Selain itu, pada perbandingan visi dalam dokumen RPJPD Wonosobo penyelarasan visi RPJPD Jateng bagian sejahtera belum tercantum yang dapat dilihat melalui gambar berikut

Tabel IV. 1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan Visi RPJPD Jawa Tengah 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya saing, dan Berkelanjutan
a. Maju, meliputi substansi: - Daya saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman	Terkemuka yang berdaya saing, meliputi substansi: - Unggul - Kompetitif - Komparatif - Mandiri - Maju - Inovatif
??? Sejahtera dan berbudaya	Sejahtera, meliputi substansi: - Terdidik - Sehat - Makmur
b. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup - Risiko bencana	Berkelanjutan, meliputi substansi: - Keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lestari - Kepentingan antargenerasi - Tangguh bencana - Adaptif
c. Tema khusus: - Penumpu pangan dan industri nasional	c. Tema khusus: - Pusat Agrobisnis dan Pariwisata

Gambar 2.1. Ketidaksesuaian Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan Visi RPJPD Jawa Tengah 2025-2045

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045, 2024 (diolah)

Hasil Diskusi:

Visi Wonosobo akan ditambahkan kata “maju” dan menghapus kata “berdaya saing”, sehingga menjadi “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

b. Keselarasan Misi Wonosobo dengan Misi Nasional dan Misi Provinsi

Berikut ini merupakan tabel keselarasan misi RPJPN, misi RPJPD Jawa Tengah, dan misi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045.

Tabel 2.4. Keselarasan Misi RPJPN, Misi RPJPD Jawa Tengah, dan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Misi RPJPN	Misi RPJPD Jawa Tengah	Misi RPJPD Wonosobo
Misi 1: Transformasi Sosial	Misi 1: Transformasi Sosial: Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing
Misi 2: Transformasi Ekonomi	Misi 2: Transformasi Ekonomi: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan
Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Misi 3: Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Misi RPJPN	Misi RPJPD Jawa Tengah	Misi RPJPD Wonosobo
Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah: Mewujudkan Kondusifitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas
Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Mewujudkan Masyarakat Berkarakter & Berketahanan Sosial; serta Ketahanan SDALH & Bencana	Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan
Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7: Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
Misi 8: Kestinambungan Pembangunan	Misi 8: Kestinambungan Pembangunan	

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Misi RPJPN, RPJPD Jawa Tengah, dan RPJPD Wonosobo saling terkait dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiganya menekankan pembangunan infrastruktur, serta ketahanan sosial dan ekologis. Wonosobo berfokus pada agrobisnis dan pariwisata, sementara Jawa Tengah mendukung pembangunan wilayah yang merata. Keselarasan ini mencerminkan upaya bersama mencapai pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Namun misi 8 RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah kurang selaras dengan misi 2 RPJPD Kabupaten Wonosobo karena berbeda konteks. Sebaiknya ada penambahan misi atau penyesuaian terhadap penyalarsan misi 8 RPJPN. Misi kestinambungan penambungan diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan (isi RPJPN).

Hasil Diskusi:

Penyalarsan misi 8 RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya misi 2 RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan akan diganti dengan misi 3 misi 2 RPJPD Kabupaten Wonosobo.

2.3. Keselarasan Misi dengan Arah Kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Tabel 2.5. Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Misi	Arah Kebijakan			
	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2044)
	Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan	Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing	Perwujudan Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan	Penguatan fondasi ekosistem inovasi agrobisnis yang berkelanjutan	Akselerasi dan perluasan kerjasama dalam pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan	Pemantapan Pengarusutamaan strategi pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan	Perwujudan pusat agrobisnis berkelanjutan
	Penguatan ekosistem industri pariwisata berbasis potensi daerah	Akselerasi Pengembangan destinasi wisata super prioritas berbasis kemitraan dengan swasta dan masyarakat	Pemantapan kolaborasi antara pelaku industri pariwisata dan industri kreatif untuk menciptakan rantai nilai yang kompetitif dan berkelanjutan	Perwujudan ekspansi industri pariwisata sebagai lokomotif perekonomian dan kesejahteraan
	Penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing di sektor agribisnis dan pariwisata	Akselerasi peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar lokal dan global	Pemantapan produktivitas tenaga kerja	Perwujudan tenaga kerja, yang produktif dan berdaya saing
Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan kualitas infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas

Misi	Arah Kebijakan			
	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2044)
	Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan	Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing	Perwujudan Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Akselerasi peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif, berdaya saing, dan berintegritas	Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global
Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta kolaborasi antarpemangku kepentingan	Akselerasi penguatan keterpaduan dalam upaya menumbuhkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pemantapan dan akselerasi resiliensi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	Perwujudan daerah yang berketahanan iklim dan bencana
	Perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Akselerasi perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Pemantapan perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Perwujudan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Pada arah kebijakan misi 1 mengenai tenaga kerja, sebaiknya dielaborasi dalam substansi agrobisnis dan pariwisata, karena keduanya biasanya sudah memuat mengenai tenaga kerja.

Tabel 2.6. Keselarasan Misi dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Periode	Arah Kebijakan 1 Terhadap Misi 1	Arah Kebijakan 2 Terhadap Misi 2	Arah Kebijakan 3 Terhadap Misi 3	Arah Kebijakan 4 Terhadap Misi 4	Arah Kebijakan 5 Terhadap Misi 5
I	Telah sesuai dan memperkuat fondasi transformasi melalui penguatan ekosistem agribisnis berkelanjutan dan pariwisata serta penguatan daya saing SDM	Telah sesuai dan memperkuat fondasi transformasi melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Telah sesuai dan memperkuat fondasi transformasi melalui penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Telah sesuai dan memperkuat fondasi transformasi melalui pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Telah sesuai dan memperkuat fondasi transformasi melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, kolaborasi, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan
II	Telah sesuai dan mempercepat transformasi melalui percepatan pengembangan kolaborasi agrobisnis dan destinasi wisata serta peningkatan kapasitas SDM	Telah sesuai dan mempercepat transformasi melalui percepatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Telah sesuai dan mempercepat transformasi melalui percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Telah sesuai dan mempercepat transformasi melalui percepatan peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	Telah sesuai dan mempercepat transformasi melalui percepatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan
III	Telah sesuai dan mendorong tercapainya misi melalui pemantapan pengembangan agrobisnis berkelanjutan, kolaborasi industri pariwisata, serta produktivitas SDM	Telah sesuai dan mendorong tercapainya misi melalui pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Telah sesuai dan mendorong tercapainya misi melalui pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Telah sesuai dan mendorong tercapainya misi melalui pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif, berdaya saing, dan berintegritas	Telah sesuai dan mendorong tercapainya misi melalui pemantapan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan
IV	Telah sesuai dan mendukung terwujudnya misi melalui perwujudan pusat agrobisnis berkelanjutan, ekspansi industri pariwisata, SDM produktif dan berdaya saing	Telah sesuai dan mendukung terwujudnya misi melalui perwujudan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Telah sesuai dan mendukung terwujudnya misi melalui perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Telah sesuai dan mendukung terwujudnya misi melalui perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global	Telah sesuai dan mendukung terwujudnya misi melalui perwujudan daerah berketahanan iklim dan bencana, SDA berkelanjutan

Periode	Arah Kebijakan 1 Terhadap Misi 1	Arah Kebijakan 2 Terhadap Misi 2	Arah Kebijakan 3 Terhadap Misi 3	Arah Kebijakan 4 Terhadap Misi 4	Arah Kebijakan 5 Terhadap Misi 5
	Arah kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dalam perwujudan misi 1	Arah kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dalam perwujudan misi 2	Arah kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dalam perwujudan misi 3	Arah kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dalam perwujudan misi 4	Arah kebijakan ini memiliki hubungan yang kuat dalam perwujudan misi 5

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Hasil Diskusi:

- Tenaga kerja pada arah kebijakan misi 1 tetap dipisah.
- Arah kebijakan misi 1 periode 1 (dan seterusnya) poin a nomor 4 ditambahkan mengenai akses pasar
- Arah kebijakan misi 1 poin b nomor 1 mengenai wisata baru akan diubah menjadi KSPPR yang telah ditetapkan sebelumnya dan ditambah penguatan destinasi wisata Dieng.
- Penambahan arah kebijakan misi 1 poin b yaitu dengan penerapan regulasi untuk pariwisata.

2.4. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025- 2045

2.4.1. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025- 2045

Tabel 2.7. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Hubungan	Keterangan
1	i. Penguatan ekosistem agribisnis berkelanjutan dan pariwisata serta penguatan daya saing SDM ii. Akselerasi pengembangan kolaborasi agrobisnis dan destinasi wisata serta peningkatan kapasitas SDM iii. Pemantapan pengembangan agrobisnis berkelanjutan, kolaborasi industri pariwisata, serta produktivitas SDM iv. Perwujudan pusat agrobisnis berkelanjutan, ekspansi industri pariwisata, SDM produktif dan berdaya saing	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kuat	Arah kebijakan mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
2	i. Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan	Sasaran Pokok 2:	Kuat	Arah kebijakan mendukung

Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Hubungan	Keterangan
	berkelanjutan ii. Akselerasi dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan iii. Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan iv. Perwujudan kualitas infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan		terwujudnya infrastruktur inklusif dan berkelanjutan baik perkotaan maupun perdesaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3	i. Penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas ii. Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas iii. Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas iv. Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Kuat	Arah kebijakan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang adaptif dan berkelanjutan untuk memastikan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan
4	i. Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh ii. Akselerasi peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial iii. Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif, berdaya saing, dan berintegritas iv. Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	Kuat	Arah kebijakan mendukung terwujudnya SDM yang sejahtera dan berkualitas yaitu yang unggul dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
5	i. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, kolaborasi, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan ii. Akselerasi resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan iii. Pemantapan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan iv. Perwujudan daerah berketahanan iklim dan bencana, SDA berkelanjutan	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Kuat	Arah kebijakan mendukung terwujudnya pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

2.4.2. Keselarasan Visi dengan Sasaran Pokok dan Indikator (IUP) dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025- 2045

Tabel 2.8. Keselarasan Arah Kebijakan dengan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Visi		Sasaran Pokok		Keterangan
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka yang Berdaya Saing: ● Indeks Daya Saing Daerah	Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata yang berdaya	<p>Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan (agrobisnis dan pariwisata)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rasio PDRB Industri pengolahan ○ Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ○ Rasio PDRB Sektor Pariwisata ○ Rasio PDRB sektor Pertanian ○ Rasio PDRB sektor Perdagangan Jumlah Tamu wisatawan mancanegara ○ Rasio Kewirausahaan daerah ○ PDRB per kapita Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ○ Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan ○ Kapabilitas inovasi <p>Stabilitas Ekonomi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Disparitas Harga ○ Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ○ Pembentukan Modal Tetap Bruto Total dana pihak ketiga pada bank milik kabupaten/kota per PDRB ○ Total kredit pada bank milik kabupaten per PDRB ○ ROA BUMD ○ Kapasitas Fiskal Daerah ○ Tingkat Paritas Daya Beli ○ Pertumbuhan Ekonomi ○ Tingkat Pengangguran Terbuka 	Digunakan sebagai indikator game changer, namun kurang tepat untuk mengukur indikator yang spesifik mendukung
		2. Terwujudnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	<p>Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Permukaan Mantap ○ Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota ○ Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten ○ Rumah tangga dengan akses hunian layak ○ Persentase desa mandiri 	

Visi		Sasaran Pokok		Keterangan
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
				agrobisnis dan pariwisata, contoh: ketersediaan pasar komoditas
		3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	<p>Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks reformasi birokrasi ○ Indeks integritas nasional ○ Indeks pelayanan publik ○ Indeks reformasi hukum ○ Transformasi Digital Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik ○ Persentase rumah tangga dengan akses internet 	
	<p>Peningkatan Kesejahteraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indeks Pembangunan Manusia ● Rasio Gini 	4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas	<p>Kesehatan Untuk Semua</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Usia Harapan Hidup ○ Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ○ Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ○ Prevalensi Gizi Buruk ○ Angka Kelangsungan Hidup Bayi ○ <p>Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca, numerasi, sains, dan teknologi informasi untuk SD dan SMP) ○ Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Harapan Lama Sekolah ○ Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ○ Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun ○ Tingkat pemanfaatan perpustakaan <p>Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Ketahanan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Budaya Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan ○ Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan 	

Visi		Sasaran Pokok		Keterangan
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah pengunjung tempat bersejarah ○ Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir ○ Jumlah kejadian konflik SARA ○ Tingkat Kemiskinan ○ Distribusi pengeluaran kriteria bank dunia ○ Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan <p>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Inklusivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ○ Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ○ Indeks Ketimpangan Gender 	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: ● Indeks Pembangunan Berkelanjutan	5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	<p>Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks Risiko Bencana ○ Penurunan Emisi GRK <p>Ketahanan Pangan dan Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prevalensi ketidakcukupan pangan (Prevalence of Undernourishment) indeks ketahanan pangan ○ Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan ○ Persentase Akses air minum layak <p>Lingkungan Hidup Berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ○ Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 	

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Sebagian besar indikator sudah sesuai digunakan sebagai alat ukur, namun terdapat beberapa indikator yang dapat disesuaikan seperti persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan, persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir, dan jumlah pengunjung tempat bersejarah kurang mencerminkan SDM yang sejahtera dan berkualitas. Nasional dan Provinsi menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Hasil Diskusi:

Indikator mengikuti Surat Edaran (SEG) Nomor 000.7/0002940 Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

2.5. Keselarasan Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

2.5.1. Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Tabel 2.9. Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan RPJPN	Arah Kebijakan RPJPD Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJPD Wonosobo
<p>Misi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan Fondasi Transformasi: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan Pembangunan SDM iii. Ekspansi Global: Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan iv. Perwujudan Indonesia Emas: Manusia Indonesia yang unggul 	<p>Misi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan Landasan Transformasi: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan pembangunan SDM iii. Pemantapan Transformasi: Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan iv. Perwujudan Jawa Tengah: Manusia Jawa Tengah unggul 	<p>Misi 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan Landasan Transformasi: Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif, berdaya saing, dan berintegritas iv. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global
<p>Misi 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan Fondasi Transformasi: Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja ii. Akselerasi Transformasi: Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi iii. Ekspansi Global: Economic Power House 	<p>Misi 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan Landasan Transformasi: Hilirisasi sektor unggulan serta penguatan produksi, ekonomi kreatif dan daya saing SDM ii. Akselerasi Transformasi: Mempercepat hilirisasi sektor unggulan serta penguatan produksi, ekonomi kreatif dan daya saing SDM iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan 	<p>Misi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penguatan Landasan Transformasi: Penguatan ekosistem agribisnis berkelanjutan dan pariwisata serta penguatan daya saing SDM ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan pengembangan kolaborasi agrobisnis dan destinasi wisata serta peningkatan kapasitas SDM iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan

Arah Kebijakan RPJPN	Arah Kebijakan RPJPD Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJPD Wonosobo
<p>yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh</p> <p>iv. Perwujudan Indonesia Emas: Negara berpendapatan tinggi</p>	<p>hilirisasi sektor unggulan serta penguatan produksi, ekonomi kreatif dan daya saing SDM</p> <p>iv. Perwujudan Jawa Tengah: Mewujudkan Jawa Tengah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan</p>	<p>pengembangan agrobisnis berkelanjutan, kolaborasi industri pariwisata, serta produktivitas SDM</p> <p>iv. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan pusat agrobisnis berkelanjutan, ekspansi industri pariwisata, SDM produktif dan berdaya saing</p>
<p>Misi 3:</p> <p>i. Penguatan Fondasi Transformasi: Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, pemberdayaan masyarakat sipil</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, masyarakat sipil partisipatif</p> <p>iii. Ekspansi Global: Kelembagaan adaptif, SDM ASN Kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, masyarakat sipil mandiri</p> <p>iv. Perwujudan Indonesia Emas: Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif</p>	<p>Misi 3:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Manajemen organisasi dan proses bisnis berbasis manajemen risiko dan kebutuhan daerah, masyarakat digital, SDM ASN berintegritas, kelembagaan kolaboratif, regulasi berbasis teknologi-infoemasi</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Mewujudkan ASN berkualitas, kelembagaan kolaboratif, partai politik berintegritas, masyarakat sipil partisipatif</p> <p>iii. Pemantapan Transformasi: Kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, regulasi efektif, ASN kompetitif dan berintegritas, serta manajemen organisasi berbasis teknologi-masyarakat sipil aktif dan berdemokrasi</p> <p>iv. Perwujudan Jawa Tengah: Mewujudkan manajemen organisasi, regulasi dan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, modern, berintegritas, serta bebas korupsi</p>	<p>Misi 3:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p> <p>iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p> <p>Perwujudan Wonosobo:</p> <p>iv. Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p>
<p>Misi 4:</p> <p>i. Penguatan Fondasi: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, serta</p>	<p>Misi 4:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Memperkuat keamanan, perencanaan kolaboratif, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta menjaga kestabilan ekonomi makro daerah sebagai landasan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Mempercepat perkuatan keamanan, partai politik berintegritas,</p>	<p>Misi 3:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p> <p>iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p> <p>iv. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan transformasi tata</p>

Arah Kebijakan RPJPN	Arah Kebijakan RPJPD Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJPD Wonosobo
<p>kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan</p> <p>iii. Ekspansi Global: Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin kawasan</p> <p>iv. Perwujudan Indonesia Emas: Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan dunia</p>	<p>pemenuhan HAM, serta menjaga kestabilan ekonomi makro</p> <p>iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan keamanan, partai politik modern, politik inklusif, masyarakat mandiri, stabilitas ekonomi makro, dan pemenuhan HAM</p> <p>iv. Perwujudan Jawa Tengah: Jawa Tengah yang aman, tangguh, berdemokrasi substansial, HAM terpenuhi, dan ekonomi makro stabil</p>	<p>kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas</p>
<p>Misi 5:</p> <p>i. Penguatan Fondasi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang setara dan inklusif</p> <p>iii. Ekspansi Global: Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan</p> <p>iv. Perwujudan Indonesia Emas: Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan</p>	<p>Misi 5:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai dasar pembangunan</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Mempercepat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi</p> <p>iii. Pemantapan Transformasi: Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi</p> <p>iv. Perwujudan Jawa Tengah: Mewujudkan Jawa Tengah yang berbudaya dan berkelanjutan</p>	<p>Misi 5:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, kolaborasi, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan</p> <p>iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekologi, SDA berkelanjutan</p> <p>iv. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan daerah berketahanan iklim dan bencana, SDA berkelanjutan</p> <p>Misi 4:</p> <p>i. Penguatan Landasan Transformasi: Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh</p> <p>ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan</p>

Arah Kebijakan RPJPN	Arah Kebijakan RPJPD Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJPD Wonosobo
		kesejahteraan sosial iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif, berdaya saing, dan berintegritas Perwujudan Wonosobo: iv. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global
Misi 6: i. Penguatan Fondasi: Optimalisasi infrastruktur, teknologi, dan layanan dasar sebagai landasan pembangunan wilayah prioritas ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan peningkatan infrastruktur, teknologi, dan layanan dasar sebagai pendorong percepatan pembangunan wilayah prioritas iii. Ekspansi Global: Mewujudkan pemerataan pembangunan serta ketahanan sosial, budaya, ekologi iv. Perwujudan Indonesia Emas: Mewujudkan pembangunan yang merata dan adil	Misi 6: i. Penguatan Landasan Transformasi: Meningkatkan pemerataan infrastruktur, teknologi, serta layanan dasar sebagai landasan pengembangan ekonomi wilayah ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan pemerataan infrastruktur, teknologi, serta layanan dasar sebagai landasan pengembangan ekonomi wilayah untuk mempercepat pengembangan ekonomi wilayah iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan pemerataan infrastruktur, teknologi, serta layanan dasar iv. Perwujudan Jawa Tengah: Mewujudkan pembangunan yang merata dan adil	Misi 2: i. Penguatan Landasan Transformasi: Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan ii. Akselerasi Transformasi: Percepatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan iii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan iv. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan
Misi 7: i. Penguatan Fondasi Transformasi: ii. Akselerasi Transformasi: iii. Ekspansi Global: iv. Perwujudan Indonesia Emas:	Misi 7: i. Penguatan Landasan Transformasi: ii. Akselerasi Transformasi: iii. Pemantapan Transformasi: iv. Perwujudan Jawa Tengah:	
Misi 8: i. Penguatan Fondasi: Reformasi tata kelola dan optimalisasi pembiayaan sebagai landasan pembangunan	Misi 8: i. Penguatan Landasan Transformasi: Menguatkan kapasitas fiskal serta pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	Misi 2: v. Penguatan Landasan Transformasi: Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan vi. Akselerasi Transformasi: Percepatan dan pemerataan

Arah Kebijakan RPJPN	Arah Kebijakan RPJPD Jawa Tengah	Arah Kebijakan RPJPD Wonosobo
berkesinambungan ii. Akselerasi Transformasi: Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah iii. Ekspansi Global: Pengembangan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah iv. Perwujudan Indonesia Emas: Sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah	sebagai dasar pembangunan berkesinambungan ii. Akselerasi Transformasi: Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pendanaan pemerintah iii. Pemantapan Transformasi: Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pendanaan non pemerintah iv. Perwujudan Jawa Tengah: Sinergi pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah	infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan vii. Pemantapan Transformasi: Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan iii. Perwujudan Wonosobo: Perwujudan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan

Sumber: Rencana Akhir RPJPN, RPJPD Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045, 2024 (diolah)

Dari tabel di atas arah kebijakan RPJPN, RPJPD Jawa Tengah, dan RPJPD Wonosobo secara umum dinilai telah selaras, namun terdapat beberapa catatan seperti:

- a. Terdapat perbedaan fokus pada arah kebijakan misi 4 RPJPN dan RPJPD Jawa Tengah yang juga fokus pada keamanan dan supremasi hukum, sedangkan pada arah kebijakan misi 3 RPJPD Wonosobo tidak ada.
- b. Arah kebijakan misi 8 RPJPN dan RPJPD Jawa Tengah dinilai kurang selaras dengan arah kebijakan misi 2 RPJPD Wonosobo karena misi 8 RPJPN dan RPJPD Jawa Tengah lebih fokus pada pembiayaan, sedangkan misi 2 RPJPD Wonosobo lebih fokus pada infrastruktur.

Hasil Diskusi:

Tidak ada diskusi khusus mengenai keselarasan arah kebijakan, namun untuk penyelarasan misi 8 RPJPN dan RPJPD Jawa Tengah akan diganti menjadi misi 3 RPJPD Wonosobo.

2.5.2. Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Tabel 2.10. Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPN	Sasaran Pokok RPJPD Jawa Tengah	Sasaran Pokok RPJPD Wonosobo
Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Masyarakat Indonesia unggul	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusi	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas
Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing inklusif, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sasaran Pokok 1: Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan ● Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan ● Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas
Sasaran Pokok 3: Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas
Sasaran 4: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya kondusifitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas ● Sasaran Pokok 1: Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis

dunia		agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
Sasaran 5: Terwujudnya Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas
	Sasaran Pokok 6: Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Sumber: Rencana Akhir RPJPN dan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045, 2024 (diolah)

Sasaran Pokok RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Wonosobo dinilai telah selaras. Ketiga sasaran pokok berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; tata kelola pemerintahan yang berintegritas; pembangunan berkelanjutan; penekanan pada SDM yang unggul, ekonomi berdaya saing, dan infrastruktur inklusif; serta memperhatikan ketahanan sosial, lingkungan, dan SDA.

Hasil Diskusi:

Tidak ada tambahan mengenai sasaran pokok.

2.5.3. Keselarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Tabel 2.11. Keselarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Wonosobo dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan RPJPN	Arah Pembangunan RPJPD Jawa Tengah	Arah Pembangunan RPJPD Wonosobo
<p>1. Transformasi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesehatan untuk semua ○ Pendidikan Berkualitas yang Merata ○ Perlindungan Sosial yang Adaptif 	<p>1. SDM Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesehatan untuk semua Pendidikan Berkualitas yang Merata Perlindungan Sosial yang Adaptif 	<p>4. SDM yang Sejahtera dan Berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesehatan untuk semua ○ Pendidikan Berkualitas yang Merata ○ Perlindungan Sosial yang Adaptif
<p>2. Transformasi Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ○ Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ○ Penerapan Ekonomi Hijau ○ Transformasi Digital ○ Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 	<p>2. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ○ Penerapan Ekonomi Hijau ○ Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ○ Transformasi Digital ○ Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 	<p>1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Unggulan (agrobisnis dan pariwisata) <p>3. Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transformasi Digital <p>2. Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
<p>3. Transformasi Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 	<p>3. Transformasi Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 	<p>3. Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif
<p>4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi ○ Substansial Stabilitas Ekonomi Makro ○ Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar 	<p>4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial ○ Stabilitas ekonomi makro daerah ○ Daya saing daerah dan ketahanan wilayah 	<p>3. Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tata Kelola yang berintegritas adaptif kolaboratif <p>1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stabilitas Ekonomi Daerah

Arah Pembangunan RPJPN	Arah Pembangunan RPJPD Jawa Tengah	Arah Pembangunan RPJPD Wonosobo
Kawasa		
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi <ul style="list-style-type: none"> ○ Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ○ Lingkungan Hidup Berkualitas Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif ○ Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ○ Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 	5. Ketahanan Sosial <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter ○ Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif 	4. SDM yang Sejahtera dan Berkualitas <ul style="list-style-type: none"> ○ Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan inklusivitas
	5. Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup, dan Bencana <ul style="list-style-type: none"> ○ Lingkungan Hidup Berkualitas ○ Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ○ Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 	5. Pengelolaan SDA dan Lingkungan yang Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> ○ Lingkungan hidup berkualitas ○ Ketahanan Pangan dan Air ○ Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Rencana Akhir RPJPN dan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045, 2024 (diolah)

Arah Pembangunan RPJPD Wonosobo dinilai sudah selaras dengan arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Jawa Tengah, namun belum mencakup ketahanan energi.

Hasil Diskusi:

Pembahasan mengenai energi tidak dimasukkan karena berada di cakupan provinsi.

2.6. Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

2.6.1. Konsistensi Antar Bab II dengan Bab III dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Tabel 2.12. Konsistensi Antar Bab II dengan Bab III dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

BAB II		BAB III		
Gambaran Umum Kondisi Wilayah		Permasalahan dan Isu Strategis Daerah		
		Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Tantangan Pembangunan
Hasil Evaluasi RPJPD	Rekomendasi			
Pertumbuhan IPM positif. Rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) hanya naik 1 poin per tahun. Rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab kemiskinan	Rekomendasi: Merumuskan strategi yang lebih jitu untuk peningkatan indikator kinerja makro,	Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Lebih rendah dari Jawa Tengah dan nasional, turun saat pandemi.	Akselerasi Sumber Daya Manusia Unggul Pendidikan: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah jadi indikator utama	
Tingkat pengangguran pada 2005- 2022 mengalami fluktuasi. Meningkatnya pengangguran terbuka disebabkan melambatnya ekonomi dan beberapa sektor yang mengalami penurunan jumlah pekerja.	khususnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, menurunkan Angka Kemiskinan, menurunkan Angka Pengangguran,	Kemiskinan dan Pengangguran Tingkat Kemiskinan: Lebih tinggi dari Jawa Tengah dan nasional, tapi menurun (2005: 31,68%, 2023: 15,58%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Lebih rendah dari Jawa Tengah dan nasional, tapi dipengaruhi krisis ekonomi dan pandemi (2020: 5,37%). Produktivitas dan Ketimpangan PDRB per Kapita: 35-41% dari PDRB nasional. Ketimpangan (Indeks Gini): Dari rendah (2007-2010) ke sedang (2010-2023).	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi Kemiskinan: Optimalkan potensi sumber daya ekonomi lokal. Multidimensional: Kemiskinan melibatkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan partisipasi sosial. Infrastruktur: Perbaiki akses dan transportasi. Pendidikan dan Pelatihan: Prioritas untuk mempersiapkan generasi masa depan.	
Kemiskinan mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari Jateng dan Nasional	meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan			
Pertumbuhan ekonomi mengalami tren peningkatan, sempat melebihi pertumbuhan Jateng dan Nasional	menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat.			
Pendapatan per kapita meningkat, namun masih jauh dari angka Jawa Tengah				
Pelaksanaan otonomi daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih merata sehingga ketimpangan pendapatan cenderung rendah dan moderat				
Memiliki topografi perbukitan hingga pegunungan menyebabkan Kabupaten Wonosobo rawan bencana tanah longsor. Struktur geologi		Kerusakan Lingkungan yang Berisiko terhadap Bencana Topografi: Curam,	Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis dan Lingkungan Hidup yang	

BAB II	BAB III		
Gambaran Umum Kondisi Wilayah	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah		
	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Tantangan Pembangunan
berupa pegunungan muda menjadikan Kabupaten Wonosobo rentan terhadap bencana alam seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor Bencana yang paling sering terjadi adalah tanah longsor (1.178 kejadian) dan cuaca ekstrem (127 kejadian terutama di Kecamatan Kejajar.	risiko longsor dan banjir tinggi. Indeks Ketahanan Daerah: Dari kategori sedang (2018-2022) ke tinggi (2023), tapi kerentanan meningkat. Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana: Kurang, terutama di dataran tinggi dengan konektivitas buruk.	Berkelanjutan Lingkungan: Tantangan dari perubahan tata guna lahan, produktivitas, iklim, sedimentasi, dan erosi harus diantisipasi Pelestarian: Pendekatan holistik dan perencanaan jangka panjang untuk keberlanjutan	
Terdapat hulu Sungai serayu yang menjadi sumber mata air yang mengalir ke Sungai Serayu, Bogowonto, Galuh, Semagung, Sanggrahan dan Luk Ulo yang dimanfaatkan untuk irigasi, pertanian, dan air minum. Sungai Serayu yang melewati Telaga Menjer menjadi sumber PLTA Garung	Penurunan Daya Dukung Daya Dukung Air: Hanya dua dari lima belas kecamatan yang memenuhi daya dukung air (Kecamatan Kertek dan Wonosobo). Daya Tampung Air: Kualitas air danau baik, tapi BOD di Telaga Menjer melebihi ambang batas		
Ketersediaan air tanah tinggi karena terdapat Lembah Wonosobo (Cekungan Air Tanah (CAT) Wonosobo). Daya dukung air 7,17			
Memiliki 19 bendung yang mengatur ritme aliran sungai.			
Wilayah yang didominasi oleh endapan gunung api membuat Kabupaten Wonosobo memiliki tanah yang subur dan mendukung pertanian		Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul Pertanian Berkelanjutan: Hilirisasi produk pertanian, regenerasi petani, dan modernisasi. Pariwisata: Kombinasi pariwisata dan pertanian, infrastruktur pendukung, dan digitalisasi informasi. UMKM: Pemberdayaan untuk nilai tambah dalam industri pariwisata.	
Memiliki telaga dan waduk yaitu T. Menjer, T. Warna, T. Cebong, W. Wadaslintang yang menjadi objek wisata.			
Lahan pertanian masih mendominasi penggunaan lahan sebesar 78.350,3 hektar atau 79,67% dari total luas wilayah dengan luas sawah yaitu 13.128,3 ha dan bukan sawah 65.222 ha Terjadi alih fungsi sawah sebesar 2,48% dalam 5 tahun terakhir (non sawah, non pertanian)	Perubahan Tata Guna Lahan/Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Belum optimal, menyebabkan penggunaan lahan tidak sesuai rencana tata ruang. Menyebabkan Kerusakan	Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul Pertanian Berkelanjutan: Hilirisasi produk pertanian, regenerasi petani, dan modernisasi.	

BAB II	BAB III		
Gambaran Umum Kondisi Wilayah	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah		
	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Tantangan Pembangunan
	lingkungan, konflik lahan, inefisiensi sumber daya. Pengawasan belum interaktif		

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Secara umum, Bab II menjadi dasar untuk menentukan permasalahan, isu strategis, dan tantangan pembangunan di Bab III. Hal ini bisa ditunjukkan dengan cascading antar bab. Data yang ada di Bab II dinilai sudah cukup lengkap yaitu memiliki data kuantitatif, kualitatif, dan spasial. Namun terdapat indikator-indikator yang digunakan pada IUP belum nampak pada data di Bab II, contoh: angka literasi. Untuk melihat keseluruhan konsistensi antar bab dalam dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui link berikut: <https://bit.ly/AntarBabRPJPDWonosobo>

Kemudian terdapat beberapa hal penting yang belum tercakup pada Bab II yang meliputi infrastruktur dan peran pemuda, yaitu:

a. Kebutuhan Fasilitas Persampahan

Telah ada proyeksi volume buangan sampah hingga tahun 2045 yang mencapai 3.031.204,50 m³/hari, namun belum disertai dengan perhitungan kebutuhan fasilitas persampahan, seperti TPA dan TPS. Sebagai upaya menangani permasalahan sampah dapat dihitung menggunakan Permen LHK No 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pengolahan Persampahan.

b. Ketersediaan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah

Belum ada perhitungan air limbah eksisting dan proyeksi. Selain itu juga belum dijelaskan mengenai ketersediaan sarana prasarana pengolahan air limbah. Jika tidak direncanakan maka dapat mengganggu lingkungan di Kabupaten Wonosobo

c. Ketersediaan Sumber Energi

Telah ada proyeksi kebutuhan listrik hingga tahun 2045. Belum dijelaskan sumber energi listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga dapat dijelaskan mengenai rencana pengembangan EBT.

d. Ketersediaan Sarana Prasarana Sumber Air Bersih

Telah dilakukan perhitungan proyeksi volume kebutuhan air bersih hingga tahun 2045 yaitu mencapai 1.316.354 m³/hari, namun belum terdapat ketersediaan sarana prasarana sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu juga perlu dijelaskan mengenai rencana konservasi air karena diperkirakan pada tahun 2043, Wonosobo diperkirakan akan mengalami defisit air.

e. Peran Pemuda

RPJPD merupakan rencana pembangunan 20 tahun kedepan, untuk itu peran pemuda sangat perlu untuk dibahas karena merekalah yang akan melaksanakan RPJPD. Dapat dijelaskan lebih rinci mengenai pemuda diantaranya permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi serta peran pemuda dalam pembangunan melalui arah kebijakan maupun sasaran pokok RPJPD.

Hasil Diskusi:

- Evaluasi pelaksanaan perda dan target APBD perlu diperhatikan, termasuk apakah pelaksanaan tahun sebelumnya molor atau tidak dan apakah sesuai dengan target dan tujuan.
- Terjadi kesalahan pengutipan aturan daya dukung 2009
- RTH masih dihitung menggunakan pembagian luas wilayah Kabupaten Wonosobo dan masih meliputi tutupan vegetasi. RTH sedang dihitung ulang sesuai Permen ATR tahun 2022 yaitu RTH kawasan perkotaan
- Penambahan pembahasan mengenai deforestasi di perkebunan kentang yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
- Pengelolaan sampah perlu ditambahkan hingga tingkat desa.
- Penggunaan data BPS sebagai data utama. Apabila tidak ada, maka menggunakan data dari sumber lain (dinas, dsb).
- Data yang digunakan harus valid dan terbaru.

- Penambahan pembahasan mengenai peternakan.
- Penambahan proyeksi PAD dari pariwisata tahun 2025-2045.
- Peningkatan lama kunjungan wisatawan tidak signifikan, sehingga perlu langkah konkret untuk mengatasinya.
- Dieng sebagai primadona pariwisata perlu dioptimalkan agar manfaat ekonominya dirasakan oleh masyarakat Wonosobo.
- Data yang masih kosong perlu dilengkapi.

2.6.2. Konsistensi Antar Bab III dengan Bab IV dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Tabel 2.13. Konsistensi Antar Bab II dengan Bab III dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Permasalahan	Isu	Tantangan Pembangunan	Visi	Misi
<ul style="list-style-type: none"> ○ Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi): Produktivitas masyarakat rendah, produktivitas ekonomi rendah, adanya ketimpangan wilayah, penurunan kontribusi sektor primer ○ Aspek Pelayanan Umum: Rasio pendapatan asli daerah rendah; penurunan kontribusi sektor primer ○ Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Ekonomi Daerah Belum Optimal (Sektor pertanian, industri pengolahan pangan, perdagangan, pariwisata, pangan) ○ Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Iklim Investasi Masih Rendah (TPT tinggi, efisiensi investasi rendah, dan faktor daya saing investasi) 	<p>Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul</p>	<p>Megatren, Demografi: Optimalisasi kebijakan dan program pembangunan manusia Menciptakan lapangan kerja dengan memperluas dan memperkuat industri kecil dan menengah, mendukung pertanian berkelanjutan, serta mengembangkan sektor pariwisata</p>	<p>Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan</p>
<p>Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Infrastruktur yang Masih Rendah (Rendahnya Infrastruktur, belum optimalnya kualitas layanan)</p>	<p>Transformasi Menuju Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkelanjutan</p>	<p>Megatren: geopolitik, pergeseran kekuatan ekonomi global</p>		

Permasalahan	Isu	Tantangan Pembangunan	Visi	Misi
Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi): Tingginya tingkat kemiskinan, Produktivitas masyarakat rendah, produktivitas ekonomi rendah, adanya ketimpangan wilayah	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi			
Aspek Pelayanan Umum: Profesionalitas ASN sangat rendah, Reformasi Birokrasi masih baik, SPBE masih ada yang rendah	Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis Ditopang oleh <i>Smart Government</i>	Megatren: Terobosan Teknologi: AI menggantikan tugas manual, menciptakan efisiensi dan peluang pekerjaan baru. Tantangan sosial-politik dari manipulasi media AI: regulasi, transparansi, akuntabilitas, literasi digital.		Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas
Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal (Nilai AHP masih rendah, rendahnya kualitas SDM) Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Sosial): Rendahnya tingkat IPM, Rendahnya tingkat IPG Aspek Pelayanan Umum: Jumlah sekolah menurun, dan kebutuhan guru meningkat signifikan, Perlu peningkatan fasilitas kesehatan	Akselerasi Sumber Daya Manusia Unggul	Megatren: Demografi: Optimalisasi Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan.		Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing
Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi): Tingginya tingkat kemiskinan, Produktivitas masyarakat rendah, produktivitas ekonomi rendah, adanya ketimpangan wilayah	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi	Megatren, Demografi: Optimalisasi kebijakan dan program pembangunan manusia Menciptakan lapangan kerja dengan memperluas dan memperkuat industri kecil dan menengah, mendukung pertanian berkelanjutan, serta mengembangkan sektor pariwisata		
Permasalahan Pembangunan dari Aspek Geografi: Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Perubahan Tata Guna Lahan/Tata Ruang, Kerusakan Lingkungan yang Berisiko terhadap Bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Tantangan iklim pada agrobisnis: risiko bencana alam, gangguan pertumbuhan tanaman, serangan hama, dan ketidakpastian produksi. Tantangan iklim pada pariwisata: perubahan cuaca, kerusakan destinasi, dan dampak alamiah lainnya. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim penting untuk ketahanan agrobisnis dan pariwisata.		Misi 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Permasalahan dan isu yang ada telah tercakup dalam visi dan misi. Visi dan misi yang disusun bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan potensi dari isu yang ada dengan menyesuaikan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo.

Hasil Diskusi:

Perlu dijelaskan penguatan dasar perumusan visi terutama pusat agrobisnis dan pariwisata, karena data menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB rendah, lahan berkurang, hasil produksi pertanian rendah, jumlah tenaga kerja dan minat kerja menurun.

2.6.3. Konsistensi Antar Bab III dengan Bab V dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Tabel 2.14. Konsistensi Antar Bab III dengan Bab V dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Permasalahan	Isu	Tantangan Pembangunan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
<ul style="list-style-type: none"> ○ Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi): Produktivitas masyarakat rendah, produktivitas ekonomi rendah, adanya ketimpangan wilayah, penurunan kontribusi sektor primer ○ Aspek Pelayanan Umum: Rasio pendapatan asli daerah rendah; penurunan kontribusi sektor primer ○ Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Ekonomi Daerah Belum Optimal (Sektor pertanian, industri pengolahan pangan, perdagangan, pariwisata, pangan) ○ Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Iklim Investasi Masih Rendah (TPT tinggi, efisiensi investasi rendah, dan faktor daya saing investasi) 	<p>Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul</p>	<p>Megatren, Demografi: Optimalisasi kebijakan dan program pembangunan manusia Menciptakan lapangan kerja dengan memperluas dan memperkuat industri kecil dan menengah, mendukung pertanian berkelanjutan, serta mengembangkan sektor pariwisata</p>	<p>Arah Kebijakan 1: Penguatan fondasi ekosistem inovasi agrobisnis yang berkelanjutan; Penguatan ekosistem industri pariwisata berbasis potensi daerah; Penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing di sektor agribisnis dan pariwisata; Akselerasi dan perluasan kerjasama dalam pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan; Akselerasi Pengembangan destinasi wisata super prioritas berbasis kemitraan dengan swasta dan masyarakat; Akselerasi peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar lokal dan global; Pemantapan Pengarusutamaan strategi pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan; Pemantapan kolaborasi antara pelaku industri pariwisata dan industri kreatif untuk menciptakan rantai nilai yang kompetitif dan berkelanjutan; Pemantapan produktivitas tenaga kerja; Perwujudan pusat agrobisnis berkelanjutan;</p>	<p>Sasaran Pokok 1: Terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan</p>
	<p>Transformasi Menuju Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkelanjutan</p>	<p>Megatren: geopolitik, pergeseran kekuatan ekonomi global</p>		

Permasalahan	Isu	Tantangan Pembangunan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
			Perwujudan ekspansi industri pariwisata sebagai lokomotif perekonomian dan kesejahteraan; Perwujudan tenaga kerja, yang produktif dan berdaya saing	
Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Infrastruktur yang Masih Rendah (Rendahnya Infrastruktur, belum optimalnya kualitas layanan)	Konektivitas Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur yang Andal Menuju Kota Layak Huni		Arah Kebijakan 2: Peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan; Akselerasi dan pemerataan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan; Pemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan; Perwujudan kualitas infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi): Tingginya tingkat kemiskinan, Produktivitas masyarakat rendah, produktivitas ekonomi rendah, adanya ketimpangan wilayah	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi			
Aspek Pelayanan Umum: Profesionalitas ASN sangat rendah, Reformasi Birokrasi masih baik, SPBE masih ada yang rendah	Tata Kelola Pemerintah yang Dinamis Ditopang oleh <i>Smart Government</i>	Megatren: Terobosan Teknologi: AI menggantikan tugas manual, menciptakan efisiensi dan peluang pekerjaan baru. Tantangan sosial-politik dari manipulasi media AI: regulasi, transparansi, akuntabilitas, literasi digital.	Arah Kebijakan 3: Penguatan Landasan Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas; Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas; Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas; Perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas
<ul style="list-style-type: none"> ○ Permasalahan Daya Saing Daerah: Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal (Nilai AHP masih rendah, rendahnya kualitas SDM) ○ Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Sosial): Rendahnya tingkat IPM, Rendahnya 	Akselerasi Sumber Daya Manusia Unggul	Megatren: Demografi: Optimalisasi Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan.	Arah Kebijakan 4: Pemenuhan standar pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh; Akselerasi peningkatan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; Pemantapan ekosistem pendidikan, kesehatan,	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sejahtera dan Berkualitas

Permasalahan	Isu	Tantangan Pembangunan	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
tingkat IPG Aspek Pelayanan Umum: Jumlah sekolah menurun, dan kebutuhan guru meningkat signifikan, Perlu peningkatan fasilitas kesehatan			dan kesejahteraan sosial yang inklusif, berdaya saing, dan berintegritas; Perwujudan SDM yang tangguh terhadap dinamika lokal dan global	
Masalah Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi): Tingginya tingkat kemiskinan, Produktivitas masyarakat rendah, produktivitas ekonomi rendah, adanya ketimpangan wilayah	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Status Sosial Ekonomi	Megatren, Demografi: Optimalisasi kebijakan dan program pembangunan manusia Menciptakan lapangan kerja dengan memperluas dan memperkuat industri kecil dan menengah, mendukung pertanian berkelanjutan, serta mengembangkan sektor pariwisata		
Permasalahan Pembangunan dari Aspek Geografi: Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Perubahan Tata Guna Lahan/Tata Ruang, Kerusakan Lingkungan yang Berisiko terhadap Bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam Strategis dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Tantangan iklim pada agrobisnis: risiko bencana alam, gangguan pertumbuhan tanaman, serangan hama, dan ketidakpastian produksi. Tantangan iklim pada pariwisata: perubahan cuaca, kerusakan destinasi, dan dampak alamiah lainnya. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim penting untuk ketahanan agrobisnis dan pariwisata.	Arah Kebijakan 5: Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta kolaborasi antarpemangku kepentingan; Perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan SDA yang berkelanjutan; Akselerasi penguatan keterpaduan dalam upaya menumbuhkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; Akselerasi perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan SDA yang berkelanjutan; Pemantapan dan akselerasi resiliensi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim; Pemantapan perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan SDA yang berkelanjutan; Perwujudan daerah yang berketahanan iklim dan bencana; Perwujudan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Arah kebijakan dan sasaran pokok yang dirancang telah relevan untuk mengatasi permasalahan, tantangan, maupun potensi dari isu yang ada. Perlu ditambahkan tantangan mengenai berakhirnya bonus demografi tahun 2030, sehingga perlu menjadi perhatian, khususnya untuk tenaga kerja produktif dan lansia.

Hasil Diskusi:

Perlunya menyusun roadmap yang jelas yang meliputi permasalahan, isu, visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, hingga indikator.

2.7. Kesesuaian Indikator (IUP) Sebagai Alat Ukur Untuk Mendukung Terwujudnya Visi Kabupaten Wonosobo 2045

Indikator utama pembangunan (IUP) yang belum tercakup dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045 berdasarkan indikator utama pembangunan RPJPN (IUP) diantaranya:

- a. Transformasi Sosial
 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
 - Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
- b. Transformasi Ekonomi
 - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
 - Biaya Logistik (% PDRB)
 - Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
 - Tingkat Penerapan
 - Ekonomi Hijau
 - Indeks Daya Saing Digital
 - Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan
- c. Transformasi Tata Kelola
 - Indeks Materi Hukum
 - Indeks Anti Korupsi
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
 - Indeks Pembangunan Hukum
 - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
 - Indeks Demokrasi
 - Tingkat Inflasi
- e. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
- Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Ketahanan Energi
- Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PRDB

Perlu dicermati dalam penghitungan target dengan memperhatikan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ada seperti pada IUP jumlah kasus kematian ibu (kasus) pada 2025 sejumlah 4 dan 2045 menjadi 1 kasus. Kematian bayi menggunakan satuan per 100.000 kelahiran hidup sesuai dengan SPM. Terdapat beberapa indikator yang menggunakan satuan yang tidak sesuai, seperti Harapan Lama Sekolah, semestinya menggunakan satuan tahun, dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Satuan	Baseline 2025	Target 2045
	h. Teknologi Informasi SMP	%	NA	92,00
11	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,94	10,09
12	Harapan Lama Sekolah	%	12,22	13,89

Gambar 2.2. Kesalahan Penggunaan Satuan Dalam Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Kemudian ditemukan indikator yang muncul dua kali yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada sasaran pokok satu yaitu terwujudnya pembangunan ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata yang berdaya. Untuk itu perlu dicermati kembali standar perhitungan yang digunakan, satuannya yang digunakan, serta penulisannya.

Hasil Diskusi:

- Untuk indeks yang digunakan telah disesuaikan dengan Surat Edaran (SEG) Nomor 000.7/0002940 Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Integrasi yang dilakukan bersifat imperatif. Berdasarkan SEG, tidak ada kewajiban mengikuti indeks dari Inmendagri.
- Baseline dan target indikator yang telah ditetapkan oleh provinsi tidak bisa diubah.
- Indikator tambahan digunakan untuk mendukung capaian visi.
- Indikator persentase satuan pendidikan yaitu sains dan teknologi informasi dihapus karena berada di tingkat nasional (PISA)
- Rasio perdagangan dan pertanian akan dihitung ulang.

- Data BPS dan Dinas Pariwisata mengenai lama tinggal wisatawan berbeda, perlu komunikasi lebih lanjut.
- Daya tarik wisata perlu ditingkatkan untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan.
- Kapasitas fiskal daerah dihapus.
- Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan melalui PDAM dan akses air minum layak akan dihitung ulang.
- Pengelolaan sampah perlu fokus pada periode awal untuk mencapai komitmen yang besar.
- Ditambahkan indikator jumlah tamu domestik.
- Target yang tidak realistis perlu dihitung ulang.

2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

2.8.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

a. Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah

Tabel 2.15. Strategi Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah dalam RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kabupaten Wonosobo

Strategi RPJPN	Strategi RPJPD Jawa Tengah	Strategi RPJPD Wonosobo
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan". ○ Fokus pada: <ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru → peningkatan konektivitas fisik dan digital. ● Pembangunan di kota besar dan megapolitan → tata kelola pemerintahan kota besar terintegrasi. ● Pembangunan di 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penumpu ketahanan pangan dan rantai industri nasional ○ Fokus pada pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. ○ Membagi 10 wilayah pembangunan berdasarkan karakteristik geografis dan interaksi wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah ○ Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian → pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek-Wonosobo-Banjarnegara-Klampok dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan kawasan strategis pertanian yang mendukung kemandirian pangan di Citanduy-Serayu ○ Fokus pada agrobisnis dan pariwisata dengan kondisi geografis dan sosiologis yang mendukung. ○ Arah pengembangan: peningkatan kualitas lingkungan hidup Dataran Tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan penyangga di sekitarnya. ○ Pusat pertumbuhan wilayah fokus pada pengembangan sektor industri hasil pertanian dan kehutanan ○ Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah fokus pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah: <ul style="list-style-type: none"> ● Sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. ● Kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam ● Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan

daerah 3T → percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar.	mempertimbangkan fungsi antarkawasan serta upaya mitigasi bencana alam	industri dan jasa pariwisata ● Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.
---	---	--

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024

Strategi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah RPJPD Wonosobo telah selaras dengan RPJPN dan RPJPD Jawa Tengah. Pengembangan pusat pertumbuhan di Wonosobo diarahkan pada agrobisnis dan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik geografi dan sosiologinya.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo 2023-2043

1) Tahap Pembangunan

- a) Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, Kawasan industri pengolahan serta Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok;
- b) Percepatan Pembangunan infrastruktur dalam dan luar Kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN;
- c) Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan
- d) Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai RTRW Tahun 2023-2043

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Wonosobo sesuai RTRW Tahun 2023-2043 yaitu mewujudkan “Kabupaten berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan”. Tujuan penataan ruang:

- a) Agroindustri: Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan dan jasa;
- b) Pariwisata: sektor unggulan dengan potensi alam, termasuk Dataran Tinggi Dieng dan 5 Dieng Baru. (Waduk Wadaslintang, Telaga Menjer, Telaga Warna, Taman Rekreasi Kalianget, dan Gunung Lanang Mergolangu)
- c) Pertanian berkelanjutan merupakan faktor utama pendukung kegiatan agribisnis maupun agroindustri. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai upaya konservasi lahan pertanian.

3) Arah Pengembangan Wilayah

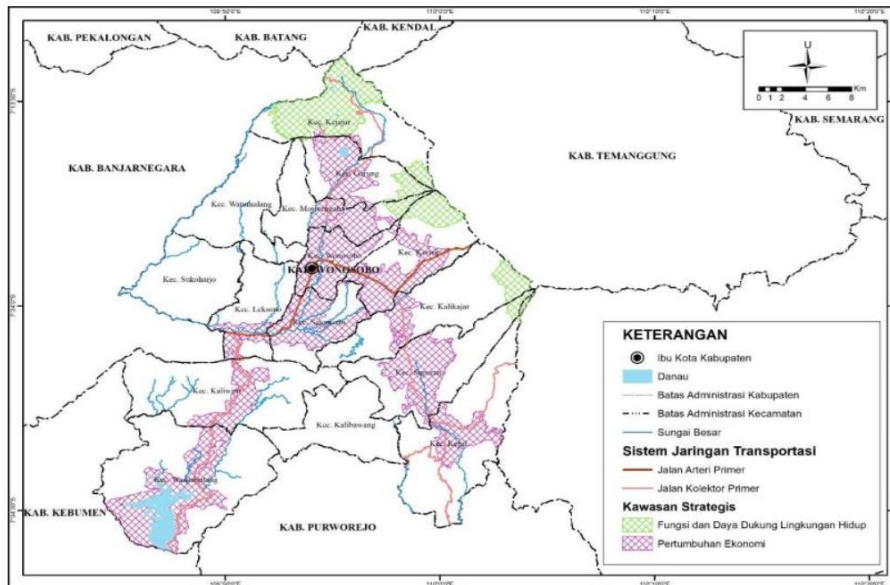
Arah pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 terbagi menjadi dua kawasan strategis kabupaten, yaitu:

- a) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - Kawasan Perkotaan Wonosobo sebagai pusat pemerintahan dan kawasan cepat tumbuh;
 - Kawasan Perkotaan Kertek sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis agrobisnis;
 - Kawasan Aglomerasi Selomerto-Leksono: sebagai pusat kawasan agropolitan
 - Kawasan Aglomerasi Mojotengah-Garung: merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya
 - Kawasan Aglomerasi Sapuran-Kepil: sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis hasil pertanian
 - Kawasan Aglomerasi Wadaslintang-Kaliwiro: sebagai pusat konservasi dan pariwisata
- b) Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Melayani kegiatan skala provinsi (Perkotaan Wonosobo).
 - Pusat kegiatan jasa skala provinsi
 - Simpul transportasi skala provinsi dan beberapa kabupaten
 - Simpul kedua kegiatan ekspor-impor pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
 - Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL): Melayani kegiatan skala kabupaten (Perkotaan Kertek: Kec. Kertek, sebagian: Kec. Wonosobo, Kec. Mojotengah dan Kec. Kalikajar).
 - Pusat kegiatan industri, jasa dan transportasi skala kabupaten atau beberapa kecamatan
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): Melayani kegiatan skala kecamatan (Selomerto, Mojotengah, Sapuran, Wadaslintang).
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): Melayani kegiatan antardesa (16 PPL: Lancar (Wadaslintang), Ropoh (Kepil), Dempel (Kalibawang), Lamuk (Kaliwiro), Sukoharjo (Sukoharjo), Tlogo (Sukoharjo), Kembaran (Kalikajar), Binangun (Watumalang), Wonoroto (Watumalang), Dieng (Kejajar), Kejajar (Kejajar).).

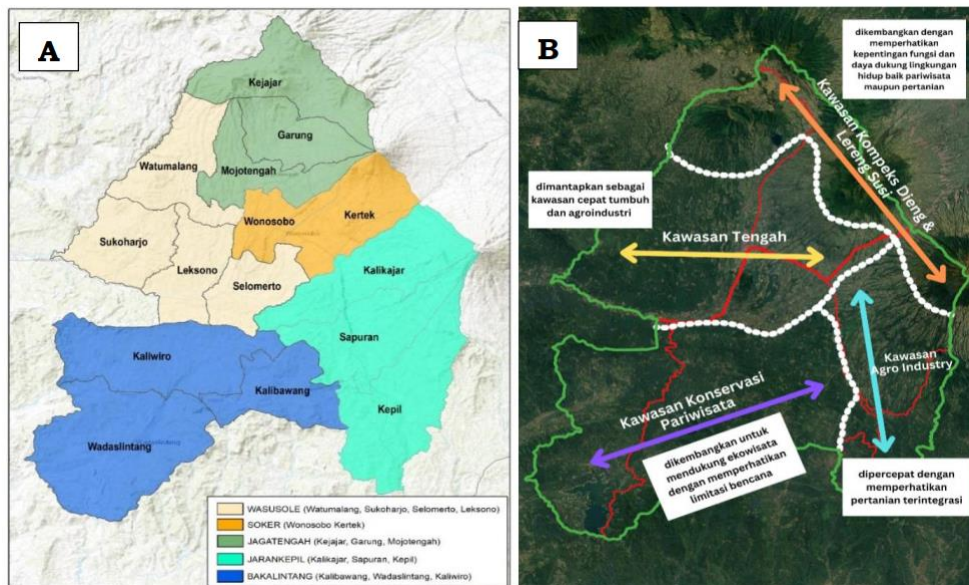
2.8.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

- 1) Tujuan Umum
 - a) Menavigasi pembangunan wilayah berdasarkan visi dan misi nasional serta potensi lokal.
 - b) Konsolidasi kebijakan lebih penting daripada komunikasi antar pemerintah.
 - c) Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.
 - 2) Implementasi Strategi
 - a) Strategi yang taktis dan konkret diperlukan untuk implementasi kebijakan.
 - b) Kerja sama terorganisir antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.
 - c) Kebijakan harus bersinergi dengan kebijakan lain, bekerja secara kolosal.
 - 3) Tingkatan Wilayah Pengembangan
 - a) Pulau Jawa: Fokus pada Kawasan Strategis Agrikultur Kemandirian Pangan (KSK-KP) untuk ketahanan pangan dan rantai pasok nasional.
 - b) Provinsi Jawa Tengah: Masuk dalam WP Wonobanjar, mengandalkan Dataran Tinggi Dieng untuk pariwisata dan peningkatan kualitas lingkungan.
 - c) Kabupaten Wonosobo: Pengembangan koridor perkotaan Kertek-Wonosobo-Banjarnegara untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- a. Kawasan Strategis dan Wilayah Pengembangan
- 1) Kawasan Strategis dan Wilayah Pengembangan
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan:
 - a) Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan sekitar Sindoro-Sumbing.
 - b) Strategi terpadu dan program pembangunan melalui Wilayah Pengembangan (WP).
 - 2) Pembagian Wilayah Pengembangan (WP)
 - a) JAGATENGAH (Kejajar, Garung, Mojotengah): Pertanian hortikultura berbasis konservasi; Pariwisata konservasi (geopark); serta Pendidikan vokasi, kebudayaan, dan permukiman.
 - b) TUJOSENO (Watumalang, Sukoharjo, Selomerto, Leksono): Pertanian tanaman pangan, agroindustri, permukiman, perdagangan, dan jasa.
 - c) KERSO (Wonosobo, Kertek): Urban farming, perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, ekowisata, rohani, dan agroindustri.
 - d) JARANKEPIL (Kalikajar, Sapuran, Kepil): Pertanian terintegrasi, agroindustri, pengembangan kawasan perdesaan Kanigara, dan permukiman.

- e) BAKALINTANG (Kalibawang, Kaliwiro, Wadaslintang): Perkebunan, ekowisata, dan pengembangan perdesaan Kusalamo.



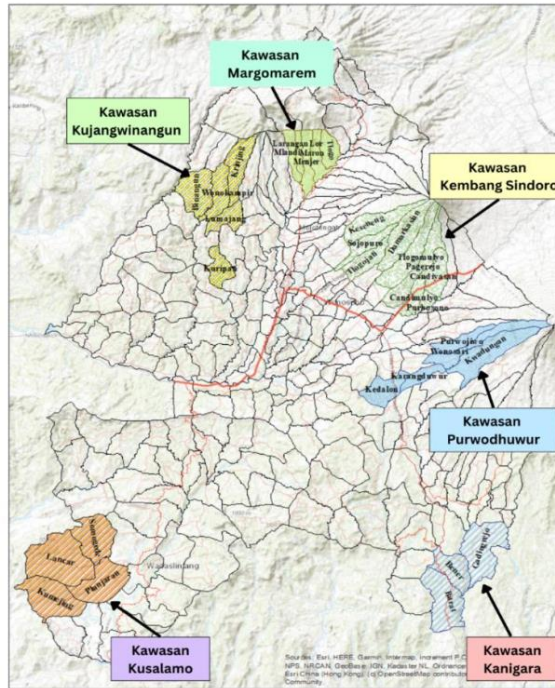
Gambar 2.3. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Wonorejo dalam RTRW 2023-2043
Sumber: DPUPR Kabupaten Wonorejo, 2023



Gambar 2.4. Wilayah Pengembangan di Kabupaten Wonorejo Tahun 2025-2045, B. Kondisi Fisiografis Pengembangan Kabupaten Wonorejo
Sumber: Bappeda Kabupaten Wonorejo, 2024

- 3) Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - a) Tujuan Umum
 - Pedoman pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan.
 - Membentuk kesatuan antar desa untuk menghilangkan ego setiap desa.
 - b) Pembagian Kawasan Perdesaan

- Kusalamo: Desa Kumejing, Plunjaran, Lancar, Somogede (Kec. Wadaslintang).
 - Kujang Kiwangun: Desa Kuripan, Lumajang, Krinjing, Wonokampir, Binangun (Kec. Watumalang).
 - Margomarem: Desa Maron, Tlogo, Menjer, Larangan Lor, Mlandi (Kec. Garung).
 - Fokus: Pariwisata (Geopark Dieng), Pertanian Hortikultura.
 - Kanigara: Desa Bener, Burat, Gadingrejo (Kec. Kepil).
 - Fokus: Ecotourism, Pertanian, jalur alternatif KSPN Borobudur-Dieng, proyek greenbelt PSN Bendungan Bener.
 - Kembang Sindoro: Desa Candiyan, Purbosono, Candimulyo, Pagerejo, Tlogomulyo, Damarkasiyan, Keseneng, Sojopuro, Tlogojati (Kec. Kertek).
 - Fokus: Jalur wisata (perkebunan teh Bedakah, Telaga Bedakah), pengembangan ekonomi, pertanian.
 - Purwadhuwur: Desa Purwojiwo, Wonosari, Karangdhuwur, Kwadungan, Kedalon (Kec. Kalikajar).
- c) Konsep Pengembangan
- Mengembangkan potensi wisata dan pertanian setiap kawasan.
 - Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- d) Keselarasan Visi RTRW dan RPJPD
- Fokus pada pertanian dan pariwisata.
 - Setiap Wilayah Pengembangan (WP) dikembangkan menjadi wilayah pertanian (agribisnis) dan pariwisata sesuai kondisi geografis.



Gambar 2.5. Persebaran Kawasan Perdesaan yang sudah ditetapkan Bupati Tahun 2024
 Sumber: Dinsos PMD, 2024

b. Kawasan Strategis dan Wilayah Pengembangan

1) WP JAGATENGAH (Hulu)

- Fokus: Pertanian hortikultura berbasis konservasi.
- Alasan: Wilayah dilindungi di hulu DAS Serayu.
- Manfaat: Mencegah erosi, menjaga keseimbangan air, meningkatkan kesuburan tanah, dan menjaga kelestarian lingkungan.

2) WP KERSO (Perkotaan)

- Fokus: Pertanian urban farming.
- Lokasi: Kecamatan Kertek dan Kecamatan Wonosobo.
- Teknik: Hidroponik, vertikultur, aquaponik.
- Manfaat: Memanfaatkan lahan sempit di perkotaan untuk pertanian di rumah, perkantoran, sekolah, dan fasilitas umum.

3) WP TUJOSENO dan WP JARANKEPIL (Lahan Luas)

- Fokus: Pertanian terintegrasi (pertanian, perikanan, peternakan).
- Alasan: Lahan luas yang mendukung pengembangan pertanian terintegrasi.
- Manfaat: Saling menguntungkan antara sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

c. Pengembangan Pariwisata

1) WP JAGATENGAH

- Fokus: Pariwisata konservasi.
- Lokasi: Geopark Dieng.
- Konsep: Pelestarian alam dan budaya.
- Manfaat: Mencegah degradasi lahan, mendukung pertanian berkelanjutan.
- Aktivitas: Trekking, kunjungan wisata geologi, atraksi budaya.

2) WP BAKALINTANG

- Fokus: Ekowisata.
- Lokasi: Wonosobo bagian selatan (Waduk Wadaslintang, Gunung Lanang, Curug Winong).
- Konsep: Menggabungkan edukasi dan rekreasi.
- Manfaat: Rekreasi sekaligus edukasi lingkungan dan budaya

Hasil Diskusi:

- Perlu dijelaskan mengenai fokus pengembangan dari masing-masing kawasan perdesaan.
- Pengembangan wilayah harus merata agar tidak terjadi ketimpangan.
- Perlu dijelaskan istilah-istilah singkatan wilayah yang digunakan untuk mempermudah dalam membaca dan memahami rencana.

2.9. Upaya Super Prioritas (*Game Changers*)

Tabel 2.16. Upaya Super Prioritas (*Game Changer*) dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Upaya Super Prioritas	Mendukung Misi	Tujuan	Arah Pembangunan
Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata	1. Mewujudkan Agrobisnis dan Pariwisata yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Menciptakan sinergi yang memperkuat nilai tambah pada sektor agrobisnis dan pariwisata. ● Memudahkan akses pelaku industri pada pasar yang lebih luas. ● Mengurangi tantangan di sektor agrobisnis dan pariwisata. ● Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengarusutamaan agrobisnis dan pariwisata dari keluarga hingga pendidikan dan pemerintahan. ● Integrasi muatan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. ● Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan berbagai lembaga terkait. ● Dukungan dan komitmen dari berbagai pihak ● Perubahan pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan budaya masyarakat
Hilirisasi Industri Pertanian dan Ekonomi Sirkular		<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. ● Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. ● Mencapai hilirisasi industri pertanian. ● Mengembangkan ekonomi sirkular. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengubah pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan budaya masyarakat ● Melakukan pemetaan komoditas pertanian sesuai kondisi geografis. ● Mengidentifikasi jenis komoditas pertanian yang dapat dihilirisasikan. ● Mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian. ● Meningkatkan teknologi digital dan inovasi melalui pendampingan dan pengembangan keterampilan wirausaha lokal. ● Memperkuat sumber daya manusia. ● Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri lokal dan promosi produk lokal di tingkat regional dan nasional. ● Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. ● Mengoptimalkan sumber daya, menggunakan bibit unggul, menerapkan teknologi ramah lingkungan, mengolah produk industri berbasis komoditas pertanian, dan mengurangi limbah serta polusi untuk menjaga penggunaan faktor-faktor produksi selama mungkin. ● Mengurangi ekspansi dan konversi lahan pertanian untuk peruntukan lain
Infrastruktur Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata		2. Mewujudkan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui desa wisata, integrasi antar destinasi wisata, <i>agroecoculture tourism</i>, <i>wellnes tourism</i>, wisata edukasi yang inklusif dan berkelanjutan ● Pemerataan akses terhadap layanan

Upaya Super Prioritas	Mendukung Misi	Tujuan	Arah Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan kesenjangan antar wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan fasilitas bisnis dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
Transformasi Digital Sektor Publik	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efisiensi birokrasi dan keterbukaan sektor publik Memperkuat kelembagaan utama pada sektor agrobisnis dan pariwisata Mendorong partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government Memanfaatkan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI) Memanfaatkan media sosial untuk partisipasi masyarakat Menggunakan teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi Meningkatkan kapasitas SDM birokrasi dalam mengelola teknologi
Reformasi Sumber Pendapatan Asli Daerah		Mencapai kemandirian fiskal, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara optimal Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses bisnis untuk memaksimalkan pendapatan dari sumber yang ada Evaluasi dan penyesuaian tarif pajak untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan Pengembangan sistem pengawasan dan penagihan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan retribusi Kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan Identifikasi dan pemanfaatan aset yang tidak produktif atau kurang dimanfaatkan.
Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi	4. Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah Meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan 	<p>Penyelenggaraan Satu Data Wonosobo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencatatan data terpadu yang terintegrasi berbasis teknologi Penerapan standar keamanan dan privasi yang tinggi. <p>Intervensi berbasis tuntas keluarga:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas hidup kelompok fakir miskin melalui jaminan sosial dan kesehatan Pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan status pendidikan Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan fakir miskin
Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin Menciptakan SDM yang unggul, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun keluarga berkualitas yang hidup sehat, mandiri secara ekonomi, berpendidikan tinggi, dan berkarakter Memperkuat kemampuan keluarga dalam perencanaan pembangunan dan partisipasi aktif dalam pembangunan Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, lansia, dan disabilitas Meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan inklusif dan pemberdayaan masyarakat

Upaya Super Prioritas	Mendukung Misi	Tujuan	Arah Pembangunan
		perkembangan teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesetaraan gender, inklusivitas, dan prinsip keadilan • Meluaskan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi muatan lokal pertanian, pariwisata, dan entrepreneurship dalam kurikulum pendidikan • Peningkatan inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi digital • Peningkatan pendidikan kecakapan hidup dan entrepreneurship berbasis pesantren • Afirmasi pada pendidikan tinggi vokasi dan peningkatan kualitas output pendidikan sesuai kebutuhan pasar kerja • Pemenuhan layanan kesehatan berbasis siklus hidup secara inklusif • Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan status kesehatan • Inovasi layanan kesehatan yang mendukung pariwisata dan pemanfaatan layanan digital • Pemenuhan jaminan kesehatan dan peningkatan sistem ketahanan kesehatan untuk menghadapi ancaman penyakit baru • Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam mendorong ketahanan keluarga dan kesetaraan gender
Pertanian dan Pariwisata Ramah Lingkungan	5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan Tujuan:	<ul style="list-style-type: none"> • Mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat • Mengurangi ancaman degradasi lingkungan akibat pola tanam dan pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan • Mengembangkan industri pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata berbasis komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan Pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan agrobisnis • Pengembangan strategi pembelajaran digital yang efektif bagi petani • Optimalisasi program petani muda melalui kolaborasi dengan berbagai pihak • Diversifikasi tujuan wisata untuk mengurangi tekanan pada destinasi yang overkapasitas • Kolaborasi antar destinasi dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil • Sertifikasi dan standarisasi usaha-usaha wisata • Mendorong pelaku industri pariwisata untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan • Kampanye etika lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan industri pariwisata dan pertanian
Reformasi Pengelolaan Sampah		<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan • Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan optimalisasi penggunaan sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan paradigma ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah • Peningkatan kualitas perencanaan dan partisipasi pemangku kepentingan • Perbaikan pengelolaan data persampahan • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, fleksibilitas kelembagaan, pendanaan, dan binding mechanism

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, 2024

Dalam arah pembangunan belum nampak indikator yang spesifik untuk mendukung upaya super prioritas ketiga yaitu infrastruktur pendukung agrobisnis dan pariwisata. Contoh arah pembangunan yang dapat mendukung upaya super prioritas kedua yaitu menyediakan fasilitas bisnis dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian untuk mengentaskan kemiskinan, dapat pula dilakukan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan usaha, sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya melalui jaminan sosial. Peran pemuda juga belum nampak dalam arah pembangunan upaya super prioritas mengenai ketahanan keluarga dan kesetaraan gender.

Tabel 2.17. Keselarasan Upaya Prioritas dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025-2045

Upaya Super Prioritas	Arah Kebijakan			
	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2044)
	Penguatan Landasan Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Akselerasi Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata yang Menyejahterakan	Pemantapan Transformasi Pusat Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing	Perwujudan Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Kolaborasi Pengarusutamaan Agrobisnis dan Pariwisata	✓	✓	✓	✓
Hilirisasi Industri Pertanian dan Ekonomi Sirkular	✓	✓	✓	✓
Infrastruktur Pendukung Agrobisnis dan Pariwisata	✓	✓	✓	✓
Transformasi Digital Sektor Publik	✓	✓	✓	✓
Reformasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	✓	✓	✓	✓
Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi	✓	✓	✓	✓
Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender	✓	✓	✓	✓
Pertanian dan Pariwisata Ramah Lingkungan	✓	✓	✓	✓
Reformasi Pengelolaan Sampah	✓	✓	✓	✓

Sumber: Rencana Akhir RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045

Hasil Diskusi:

- Peran pemuda akan ditambahkan dalam *game changer* ketujuh, mengikuti rangkaian keluarga dan pertumbuhan generasi.
- *Game changer* dirasa masih kurang kuat digunakan untuk dijadikan loncatan sehingga perlu dipertajam.
- Penjelasan mengenai *game changer* sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan pelaksana dokumen. Sebaiknya diberikan penjelasan yang lebih lugas ketika menggunakan istilah asing..
- Pengelolaan sampah perlu didukung oleh regulasi seperti peraturan desa untuk pengelolaan sampah dan diterapkan secara merata.
- Perlu adanya pengelolaan SDM untuk persampahan terutama di pusat pariwisata.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil reviu dokumen RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045, berikut catatan yang dapat diperhatikan sebagai tindak lanjut penyempurnaan dokumen RPJPD:

1. Secara umum, sistematika dokumen RPJPD Wonosobo telah mengikuti pedoman, dan tahapan proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Rumusan visi dan misi RPJPD Wonosobo melalui proses kesepakatan dalam forum Konsultasi Publik dan Musrenbang yang melibatkan semua pihak.
2. Substansi dari dokumen RPJPD Wonosobo dinilai sudah cukup dan mendukung ketercapaian visi dan misi jangka panjang RPJPD. Ada beberapa catatan secara teknis untuk menyempurnakan dokumen, contoh pada bagian dasar hukum, kondisi wilayah, penajaman permasalahan dan isu strategis.
3. Contoh substansi dokumen yang dinilai kurang sesuai dengan sistematika pedoman, antara lain muatan substansi dalam bab 2, pada Aspek Daya Saing yang digabung dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Penggabungan ini bisa berdampak pada kurangnya fokus pada masing-masing aspek, serta beberapa indikator yang muncul sebagai IUP, namun di gambaran kondisi daerah belum nampak gambaran kondisi datanya.
4. Arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok, dan indikator yang termuat dalam dokumen telah menjelaskan bagaimana visi dan misi dapat dicapai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan seperti arah kebijakan khususnya untuk mewujudkan pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah.
5. Dalam upaya pencapaian *game changer*/upaya super prioritas, pada aspek infrastruktur pendukung agrobisnis dan pariwisata masih belum nampak indikator yang spesifik mendukung infrastruktur pendukung agrobisnis dan pariwisata, contoh: infrastruktur dalam menyediakan fasilitas bisnis dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
6. Masih diperlukan pencermatan terhadap indikator utama pembangunan (IUP), seperti penulisan satuan indikator serta terdapat pengulangan penulisan indikator.
7. Baseline 2025 dan target 2045 telah ditentukan dari Provinsi melalui Surat Edaran Gubernur. Untuk itu perubahan target dapat dilakukan pada target per 5 (lima) tahunan / per periode RPJPD tahapan 1-2-3-4 dengan melihat fokus tahapan lima tahunan:

Penguatan Landasan Transformasi – Akselerasi Transformasi – Pemantapan Transformasi – Perwujudan.

8. Target pada Indikator Utama Pembangunan ditentukan secara realistis dan logis untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, serta dilengkapi dengan metadata sebagai penjelasan dari indikator yang digunakan sebagai sasaran visi dan IUP (indikator utama pembangunan)
9. Upaya super prioritas (*game changer*) ditekankan pada upaya perubahan untuk mempercepat proses tercapainya sasaran pokok. Fokus pembangunan jangka panjang (pertanian dan pariwisata) menjadi 2 tema besar yang dapat dipertajam substansinya, misal pada penambahan data, penjelasan masalah-isu, arah kebijakan, sasaran pokok, maupun pada upaya super prioritas (*game changer*).
10. Dasar hukum dalam Ranperda, pada bagian peraturan perundangan perlu dicermati kembali. Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011, pasal 7 ayat (1), untuk hieraki peraturan, yang bisa digunakan adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.



PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO